

## PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS DATA DAN JURNAL UNTUK REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN

<sup>1</sup>BAMBANG SETIAJI, <sup>2</sup>P.A. KODRAT PRAMUDHO

<sup>1</sup>Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan BKPK Kemkes RI, <sup>2</sup>Program Studi Magister  
Kesehatan Masyarakat Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung  
e-mail: [setiajiresty@gmail.com](mailto:setiajiresty@gmail.com)

### ABSTRAK

Dalam membuat rekomendasi kebijakan di bidang kesehatan dibutuhkan data atau informasi yang valid sehingga rekomendasi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Rekomendasi yang dikembangkan tidak harus melalui penelitian yang panjang sehingga memerlukan sumber daya yang besar. Bisa dilakukan secara cepat melalui penelusuran data dan jurnal dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tujuan dari studi ini adalah memberikan informasi khususnya kepada para pembuat rekomendasi kebijakan untuk dapat memanfaatkan teknologi berbasis data dan jurnal dalam membuat rekomendasi kebijakan bidang kesehatan. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah melalui penelusuran kepustakaan dan berbagai review dari berbagai sumber terkait substansi dari studi ini. Adapun temuan dari studi ini adalah diperolehnya informasi terkait bagaimana memanfaatkan teknologi informasi berbasis data dan jurnal untuk rekomendasi kebijakan bidang kesehatan. Studi ini hanya menggali data dan informasi melalui penelusuran data sekunder. Studi ini bermanfaat dalam mengembangkan rekomendasi kebijakan di bidang kesehatan secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis data dan jurnal.

**Kata Kunci:** Pemanfaatan Teknologi Informasi, Rekomendasi Kebijakan Kesehatan

### ABSTRACT

In making policy recommendations in the health sector, valid data or information is needed so that the recommendations conveyed are truly in accordance with the facts on the ground. The recommendations developed do not have to go through lengthy research so that it requires large resources. This can be done quickly through searching data and journals by utilizing information technology. The purpose of this study is to provide information, especially to policy recommendation makers to be able to utilize data-based technology and journals in making policy recommendations in the health sector. The methodology used in this study is through literature searches and various reviews from various sources related to the substance of this study. The findings of this study are the obtaining of information related to how to use data-based information technology and journals for policy recommendations in the health sector. This study only explores data and information through secondary data searches. This study is useful in developing policy recommendations in the health sector effectively and efficiently through the use of data-based information technology and journals.

**Keywords:** Utilization of Information Technology, Health Policy Recommendations

### PENDAHULUAN

Saat ini di era globalisasi kemajuan teknologi berkembang cukup pesat. Salah satu kemajuan teknologi di dunia adalah Teknologi Informasi (TI) yang merambah memasuki semua bidang kehidupan. Kemajuan setiap bidang tak lepas dari peran teknologi sebagai pendorong khususnya teknologi informasi. Untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi diperlukan pengelolaan data yang baik (Wahono, 2015).

Salah satu hasil teknologi informasi adalah internet. Internet merupakan sumber daya yang mampu menjangkau kebutuhan informasi seluruh dunia. Internet bukan hanya sekedar

jaringan dan daya guna dari komputer itu sendiri tetapi juga merupakan sumber daya informasi. Hubungan komputer dengan internet sangat penting karena komputer melakukan pekerjaan memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain dan mengeksekusikan program-program yang memberi kesempatan mengakses informasi. Sedangkan internet mendukung tumbuhnya penerbitan elektronik. Berbagai jurnal, makalah symposium dan karya *preprint* para pakar diterbitkan dalam edisi elektronik dan dalam berbagai macam bidang keilmuan termasuk jurnal kesehatan (Mildawati, 2016).

Jurnal kesehatan merupakan jurnal ilmiah yang menyajikan artikel yang relevan dengan isu-isu kesehatan masyarakat, kebidanan, keperawatan, kesehatan klinis dan sosial baik berupa artikel hasil penelitian, artikel review, literatur atau artikel laporan lapangan seperti *research report* atau *field report*. Selain itu jurnal kesehatan juga merupakan sarana publikasi dan sarana berbagi riset dalam pengembangan di bidang kesehatan. Seiring dengan perkembangan teknologi maka pemanfaatan informasi jurnal oleh masyarakat lebih banyak digunakan dalam bentuk jurnal elektronik. Sama hal dengan jurnal cetak, jurnal elektronik memuat artikel ataupun bahasan yang bersifat ilmiah dari hasil penelitian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan berdasarkan ilmu tertentu. Hanya bedanya jurnal elektronik disajikan dalam bentuk digital (Safitri, 2017).

Pemanfaatan penelitian dalam kebijakan kesehatan telah dilakukan sejak lama. Para akademisi dan praktisi kebijakan menjadikan hasil penelitian sebagai bukti untuk kebijakan kesehatan yang disebut *Evidence Based Medicine (EBM)*. Sedangkan pemanfaatan bukti ilmiah kebijakan public dalam bidang social disebut dengan *Evidence Based Policy (EBP)*. Munculnya istilah kebijakan berbasis bukti berawal dari pengertian bahwa kebijakan-kebijakan yang ada selama ini dibuat hanya berdasarkan intuisi, ideology, kebijaksanaan konvensional, opini public dan kepentingan politik tanpa bukti yang jelas (Leni, Alexandri, Ismanto, & Widyaningsih, 2018).

Pengembangan kebijakan pada Kementerian Kesehatan berlaku *top-down*. Disini Kementerian Kesehatan memiliki kewenangan dalam penyiapan kebijakan, sedangkan implementasi dan strateginya adalah *bottom-up*. Kebijakan yang dikembangkan hendaknya dikembangkan dengan partisipasi oleh aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan yang dikembangkan realistis dan dapat mencapai sasaran. Untuk itu komitmen para pemegang dan pelaksana kebijakan sangat diperlukan (Roy G.A. Massie, 2009).

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan perlu diperkuat dengan penelitian selanjutnya. Dalam pemanfaatan teknologi informasi berbasis data dan jurnal ini, bila diperlukan bisa diperkuat dengan melakukan penggalian informasi yang lebih mendalam melalui wawancara mendalam kepada *stakeholder* terkait yang diperlukan.

#### **a. Pemanfaatan Data Hasil Penelitian untuk Bukti Kebijakan Publik**

Penelitian (riset) merupakan sumber informasi dan rekomendasi bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan publik. Namun sayangnya hasil penelitian yang telah dianalisis sedemikian rupa terkadang kurang mampu menjadi media komunikasi dengan pengambil kebijakan. Seharusnya hasil pengembangan dari penelitian hendaknya dapat dijadikan naskah akademik. Namun kondisi tersebut juga belum berjalan dengan maksimal. Banyak hasil riset yang tidak dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan karena proses diseminasi penelitian dilakukan hanya sebagian saja. Hal ini menggambarkan bahwa antara peneliti dan pengambil kebijakan terdapat gap yang sangat lebar. Oleh karena itu untuk menjembatani situasi gap tersebut, dibutuhkan media komunikasi yang lebih ringkas namun memiliki substansi yang sudah mewakili informasi-informasi yang relevan dengan kebijakan yang akan diambil. Jika hambatan ini dapat dihilangkan, maka dapat menciptakan kebijakan publik yang lebih berkualitas dengan memperhatikan informasi yang relevan melalui kajian ilmiah. Sehingga

kemungkinan kegagalan kebijakan dapat diminimalisir secara signifikan (Badan Litbangkes, 2021)

Dikatakan Viqra Ramadani (2019) Penerapan kebijakan berbasis bukti di Indonesia merupakan hal yang baru dan sangat penting. Kebijakan berbasis bukti diperlukan karena dapat dilihat dari efektifitas, efisiensi, orientasi layanan public, akuntabilitas dan kepercayaan. Berbagai data perlu dilakukan guna menghasilkan analisis dan bukti yang diperlukan pemerintah untuk memahami dengan benar apakah kebijakan mencapai sasaran, berjalan sesuai rencana, dan apakah pelayanan telah diberikan secara efektif. Sehingga bukti yang digunakan harus mendukung kebijakan.

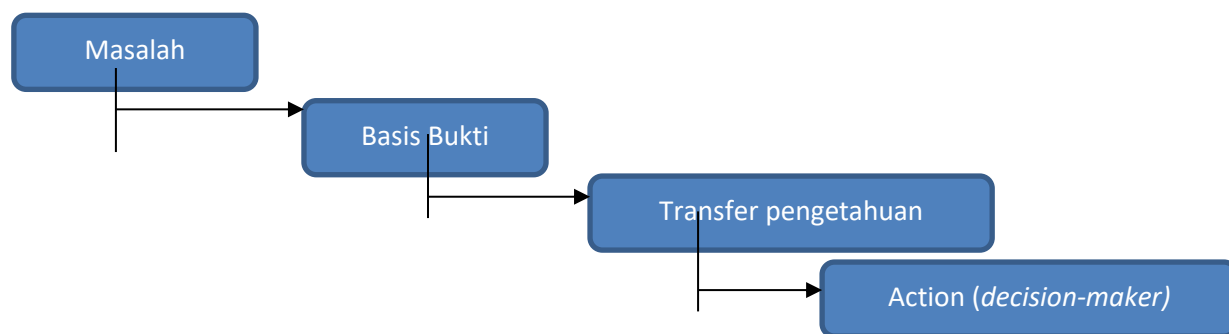
Ada tiga jenis bukti dalam kebijakan public menurut Head (2008) dan Jones (2012) yang dikutip penelitian Novia EL dan Ida W (2019) seperti tabel berikut ini:

**Tabel 1. Jenis Bukti**

Jenis Bukti	Definisi
Data statistik dan administratif	Bukti yang membantu menggambarkan kondisi terkini dari suatu isu dan menjelaskan trend historis.
Bukti berbasis penelitian	Bukti yang menggambarkan hubungan sebab akibat. Hal ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang “kenapa segala sesuatu terjadi dengan caranya masing-masing” dan menjelaskan hubungan antar isu
Bukti dari masyarakat dan pemangku kepentingan	Bukti yang berkontribusi ada pemahaman kita tentang siapa yang enilaio kebijakan dan bagaimana kemungkinan mereka aka merespons (seperti organisasi masyarakat sipil atau industry)
Butki dari evaluasi	Bukti yang membantu menjelaskan keberhasilan di masa lalu atau dalam situasi yang serupa

*Sumber: Head (2008) dan Jones (2012)*

Menurut Roy GA Massie (2009) data-data yang didapatkan dari hasil penelitian terhadap pengembangan suatu kebijakan kemungkinan bersifat normatif. Namun demikian langkah-langkah yang diambil dalam penyusunan kebijakan kesehatan sasarannya adalah tahapan yang berbasis bukti. Skema di bawah ini menggambarkan langkah-langkah untuk sampai kepada kebijakan.



**Gambar 1. Langkah-langkah pada Kebijakan Kesehatan**

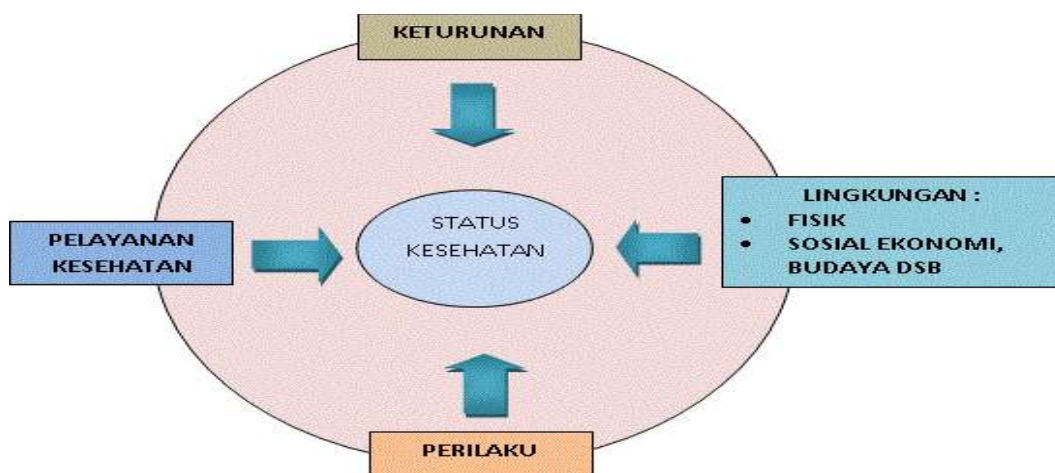
Hal yang perlu diperhatikan pada gambar langkah-langkah kebijakan kesehatan adalah bagaimana mendapatkan data yang berbasis bukti yang tentunya harus melalui suatu rangkaian penelitian yang dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan. Pada langkah-langkah tersebut tergantung kepada pengalaman peneliti, teori, acuan kepustakaan termasuk cara untuk mentransfer pengetahuan. Dengan kata lain kebijakan kesehatan yang berbasis bukti yang

menggunakan metode-metode untuk mentransfer pengetahuan kepada pengambil kebijakan sangat diperlukan agar dapat diimplementasikan. Pada tingkatan proses pemindahan pengetahuan, hasil dari penelitian ditranslasikan ke dalam rekomendasi dari kebijakan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari hasil penelitian. Disinilah para peneliti dan analis kebijakan membuat rekomendasi kebijakan terhadap program kesehatan. Jadi hasil penelitian harus diberikan kepada penentu kebijakan agar dapat dimanfaatkan. (Roy GA Massie, 2009)

#### b. Kebijakan Kesehatan di Indonesia

Definisi kesehatan menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pengertiannya adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kedua definisi ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dikembangkan oleh WHO, yaitu: kesehatan adalah suatu keadaan yang sempurna yang mencakup fisik, mental, kesejahteraan dan bukan hanya terbebasnya dari penyakit atau kecacatan (Kemenkes, 2009).

Diambil dari buku Administrasi Kebijakan Kesehatan (Dachi, 2016) dikatakan indikator tingkat/derajat kesehatan untuk tercapainya keadaan seimbang yang dinamis antara fisik, mental, sosial maupun spritual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal ini diperkuat dengan teori Blum (1981) yang mengatakan bahwa ada 4 (empat) faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan derajat kesehatan, yaitu faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor genetika, sebagaimana digambarkan berikut ini:



**Gambar 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan**

Adapun Kebijakan Kesehatan menurut Dachi (2016) diartikan sebagai suatu rangkaian konsep, asas, ketentuan pokok, dan keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok pelaku politik yang menjadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai keadaan seimbang yang dinamis antara fisik, mental, sosial maupun spritual yang dipastikan tidak ada indikasi keluhan ataupun tidak terdapat tanda-tanda penyakit atau kelainan agar masyarakat dapat hidup produktif baik secara sosial dan maupun ekonomi.

Berdasarkan ulasan tersebut, suatu kebijakan kesehatan hendaknya memperhatikan keempat faktor yang mendukung dalam pencapaian derajat kesehatan yang optimal sebagai dampak yang diharapkan dari kebijakan yang dicapai secara optimal pula. Selain itu perlu

diketahui ternyata dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa dari faktor-faktor tersebut, faktor lingkungan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya dan selanjutnya disusul oleh faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan dan urutan terakhir adalah faktor genetika

Pada dasarnya tujuan dari kebijakan kesehatan adalah untuk menyediakan pola pencegahan (*preventive*), pelayanan yang terfokus pada pemeliharaan kesehatan (*promotif*), pengobatan penyakit (*curative*), pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) dan perlindungan terhadap kaum rentan. Oleh sebab itu kebijakan kesehatan yang baik harus berpihak pada kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap berbagai masalah kesehatan dan bertujuan jangka panjang (Dachi, 2016).

**c. Jurnal Kesehatan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi**

kebijakan publik yang adaptif berbasis *Big Data* dan *Artificial Intelligence* menjadi sangat penting. Berbagai penelitian melaporkan bahwa *big data* sangat berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan salah satunya untuk implementasi penanganan status gizi dalam lingkungan layanan kesehatan primer. *Big data* kesehatan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti data pemerintah, data penelitian, data rutin kesehatan, data perangkat teknologi, data media sosial, dan lain-lain. *Big data* berpotensi meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan kesehatan di Indonesia (Hermawan, dkk 2020)

Kemajuan di bidang telekomunikasi memungkinkan hubungan antar jaringan yang dinamakan internet. Internet adalah salah satu hasil teknologi informasi yang merupakan sumber daya informasi yang mampu menjangkau seluruh dunia. Internet bisa dipandang sebagai perpustakaan global yang dapat dipergunakan oleh pemakai dimana saja dan kapan saja selama jaringannya tersedia. mendukung tumbuhnya penerbitan elektronik dalam bentuk jurnal, makalah, symposium dan karya *preprint* dari para pakar yang diterbitkan dalam edisi elektronik. Teknologi komunikasi memungkinkan sumber-sumber informasi berbasis elektronik dapat diperoleh pada waktu hampir bersamaan pada saat dipublikasikan. Informasi *paper-based* sekarang mulai digeser oleh informasi *electronic-based*. Seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2017) ternyata sebagian besar responden lebih suka memanfaatkan jurnal elektronik untuk memenuhi kebutuhannya akan informasi dengan alasan karena dapat diakses seluas-luasnya melalui internet.

**d. Rekomendasi Kebijakan Kesehatan**

Rekomendasi kebijakan Kesehatan merupakan hasil dari proses evaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan untuk menentukan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, politik kesehatan dan fisik yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat. Salah satu bentuk bahan advokasi rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan disebut naskah *policy brief* (litbangkes.go.id, 2018).

*Policy brief* merupakan suatu media yang mendeskripsikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan tertentu atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini. Biasanya digunakan dalam proses advokasi kebijakan sebagai alat untuk meyakinkan para pengambil kebijakan/kelompok sasaran mengenai urgensi masalah saat ini dan kebutuhan untuk mengadopsi alternatif yang dipilih. Oleh karena itu, bentuk media ini berfungsi sebagai pendorong untuk mengambil tindakan. Sementara itu, menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan, *policy brief* atau risalah kebijakan merupakan tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan (Lembaga Administrasi Negara RI, 2017)

Pada saat ini pembuatan rekomendasi kebijakan belum secara maksimal melibatkan analisis kebijakan, hal ini dikarenakan analisis kebijakan merupakan fungsional baru di

Kementerian Kesehatan. Terbitnya Perpres No. 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan merupakan momentum untuk mendesain pembagian peran antara peneliti dan analis kebijakan. Menurut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 tahun 2016, tugas analis kebijakan adalah memberi masukan dalam proses penyusunan kebijakan, proses penyusunan RUU baik berupa *Policy Brief*, *Policy Memo*, naskah akademik. Peran analis kebijakan adalah produksi dan manajer pengetahuan rekomendasi kebijakan, pengembangan kompetensi dan profesi serta advokasi kebijakan (Badan Litbangkes, 2021)

Penyusunan rekomendasi adalah penilaian alternative memberikan gambaran mengenai sejumlah pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan. Langkah akhir analisa kebijakan merumuskan saran alternative yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimal dalam berbagai kondisi yang dilengkapi dengan strategi pelaksanaannya. Menurut Dachi (2016) Adapun rumusan rekomendasi kebijakan yang baik minimal hasrilan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Apa yang akan dikerjakan
- 2) Informasi atas aksi yang akan dilakukan
- 3) Prosedur penetapan kebijakan
- 4) Faktor pendukung untuk menentukan rekomendasi
- 5) Estimasi tingkat risiko, ketidakpastian, akibat ganda dan kriteria pilihan
- 6) Rekomendasi pengambilan keputusan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi dan Martini, 1996). Jenis penelitiannya menggunakan kajian Pustaka. Pustaka yang dikaji adalah jurnal-jurnal yang diperoleh dari *e-jurnal*, *search google* dan *google scholar*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menganalisis jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Setelah dilakukan analisis kemudian divalidasi dengan menggunakan triangulasi data untuk mendapatkan kebenaran informasi dari berbagai sumber yang didapat dari pengumpulan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sumber Pustaka dalam penelitian ini menggunakan tiga belas penelitian yang diperoleh dari *e-jurnal*, *search google* dan *google scholar*. Penelitian tersebut memuat tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi berbasis data dan jurnal dalam penyusunan rekomendasi kebijakan Kesehatan. Adapun penelitian yang menjadi referensi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Kesehatan: Proses, Implementasi, Analisis dan Penelitian oleh Roy GA. Massie (2009)
2. Making Health Policy oleh Kenty Buse, Nicholas Mays dan Gill Walt (2012)
3. Sistem Informasi Geografis: Trend Pemanfaatan Teknologi Informas untuk Bidang Terkait Kesehatan oleh Annisa Ristya Rahmanti dan Arief Kurniawan Nur Prasetyo (2012)
4. Perancangan Tatakelola Teknologi Informasi untuk Peningkatan Layanan Sistem Informasi Kesehatan (Studi Kasus dinas Kesehatan Kabupaten Jepara) oleh Buang Budi Wahono (2015)
5. Administrasi Kebijakan Kesehatan oleh Rahmat Alyakin Dachi (2016)
6. Teknologi Informasi dan Perkembangannya di Indonesia oleh Titik Mildawati (2016)
7. Pemanfaatan Jurnal Elektronik Bidang Kesehatan di Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Oleh Pemustaka oleh Nadya Safitri (2017)
8. Pemanfaatan Teknologi dalam Bidang Kesehatan Masyarakat oleh Ahmad Yani (2018)

9. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Sistem E-Health Alodokter.com oleh Ditha Prasanti dan Sri Seti Indriani (2018)
10. Pengertian Teknologi Informasi, serta Tujuan dan Fungsinya oleh Kemala Putri (2018)
11. Kebijakan Berbasis Bukti (*Based Policy Evidence*) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Makasar (Studi Kasus pada Bappeda Kota Makassar) oleh Viqra Ramadanti (2019)
12. Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Kebijakan Publik Studi Kasus pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat oleh Novia Elva Leni, Moh Benny Alexandri, Slamet Usman Ismanto dan Ida Widianingsih (2019)
13. Kajian Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome oleh Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara (2020)
14. Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Masa Pandemi COVID-19 oleh Rita Komalasari (2020)
15. Kebijakan Kesehatan oleh Syaiful Arief (academia.edu)
16. Sistem Informasi Kesehatan oleh Raden Sanjoyo (academia.edu)

Teknologi informasi berkembang sangat cepat. internet adalah salah satu hasil teknologi informasi yang merupakan sumberdaya informasi yang mampu menjangkau seluruh dunia. Internet juga dapat dikatakan sebagai perpustakaan global, sehingga seluruh pengguna dapat berpartisipasi di segala tempat dan segala waktu selama pengguna dapat mengaksesnya. Internet memberi kesempatan pada pemakainya diseluruh dunia tidak hanya untuk berkomunikasi namun juga dapat berbagi dan menggunakan sumber daya informasi yang tersedia (Mildawati, 2016)

Era globalisasi sekarang ini menyebabkan kemajuan teknologi berkembang dengan begitu pesat. Salah satu kemajuan teknologi informasi merambah pada bidang kesehatan. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan solusi tepat bagi pemecahan masalah layanan public. Informasi adalah hal yang sangat penting. Karena semua hal terkait kesehatan masyarakat adalah informasi yang dikelola dengan baik dan aman. Sehingga dibutuhkan suatu system yang baik agar diperoleh informasi yang dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat (Yani, 2018).

Perkembangan teknologi informasi yang berkembang semakin pesat tidak bisa dihindari. Tuntutan global menuntut semua sector dalam kehidupan manusia untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi. Tahun 2020 adalah menjadi awal decade yang menarik dalam dunia kedokteran dan sains. Dengan berbagai pengembangan beberapa teknologi digital yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah klinis dan penyakit. Teknologi digital ini mencakup *internet of things (IoT)* dengan jaringan telekomunikasi generasi mendatang misalnya analitik Big Data (Komalasari, 2020).

Kebijakan publik adalah instrumen bagi pemerintah dalam merespon dinamika yang ada di tengah masyarakat. Pemerintah haruslah mengeluarkan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan prioritas kebutuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah public. Oleh karena itu, bukti menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan public agar kebijakan yang dihasilkan menjadi sebuah kebijakan yang berkualitas dan efektif. Pemanfaatan data hasil penelitian dalam kebijakan publik telah dilakukan sejak tahun 1972 yaitu dalam bidang kesehatan. Para akademisi dan praktisi kebijakan telah menjadikan hasil penelitian sebagai bukti untuk kebijakan kesehatan yang dikenal dengan *Evidence Based Medicine (EBM)*. Sedangkan dalam kebijakan sosial dikenal dengan *Evidence Based Policy (EBP)*. Selama ini kebijakan biasanya tidak didasarkan pada bukti yang ada. Kebijakan dibuat hanya berdasarkan pemikiran sepihak dan intuisi yang dimiliki oleh pembuat kebijakan. Kebijakan berbasis bukti diartikan sebagai suatu pendekatan untuk pengambilan keputusan atas kebijakan melalui topangan informasi akurat berbasis data hasil penelitian. Kebijakan berbasis bukti adalah kebijakan

public yang diinformasikan berdasarkan bukti yang objektif. Sebuah aspek penting dari kebijakan berbasis bukti adalah penggunaan penelitian ilmiah yang valid seperti uji coba terkontrol secara acak untuk mengidentifikasi program dan praktek yang mampu meningkatkan hasil kebijakan yang didukung data relevan. Unsur penting dalam kebijakan berbasis bukti yaitu data yang baik, kemampuan analisis dan dukungan politik (Leni, Alexandri, Ismanto, & Ida Widianingsih, 2018).

Data merupakan bukti yang penting. Karena data yang telah diolah untuk menjadi bukti tetap harus diterjemahkan secara subyektif. Proses penyusunan rekomendasi kebijakan dengan cepat adalah tuntutan kepada para analis kebijakan. Penelitian di lapangan adalah hal yang sangat penting, tetapi memerlukan proses yang panjang. Pengambil keputusan sering kali menuntut agar penyusunan rekomendasi kebijakan berjalan cepat tanpa mereka sadari bahwa pengambilan keputusan tanpa didasari data yang baik akan berdampak pada tidak efektifnya kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat (Roy G.A. Massie, 2009).

Kebijakan kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Karena kebijakan merupakan bagian terdepan dari ekonomi yang disebabkan karena adanya inovasi dan investasi dalam bidang teknologi kesehatan baik itu bio-medical maupun produksi termasuk usaha dagang yang ada pada bidang farmasi. Terlebih penting lagi adalah kebijakan kesehatan melibatkan persoalan hidup dan mati manusia. Selain itu kebijakan kesehatan merupakan bagian dari suatu organisasi, kekuatan dari aspek politik yang mempengaruhi masyarakat pada tingkat lokal, nasional dan dunia. Proses pengembangan kebijakan melalui serangkaian tahapan yaitu identifikasi masalah dan isu, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan (Buse, Mays & Gill Walt, 2012).

Proses terjadinya pembuatan rekomendasi kebijakan yaitu melalui proses yang di dahului dari pemaduan berbagai informasi, termasuk hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini berarti bahwa hubungan peneliti dan analis kebijakan saling mendukung karena tanpa adanya hasil-hasil penelitian, pembuatan rekomendasi kebijakan menjadi tidak valid (*evidence based policy*). Setelah proses penelitian selesai dilaksanakan, tugas analis kebijakan yaitu membuat rekomendasi kebijakan dengan kaidah-kaidah analisis kebijakan. Pada tahapan inilah sebuah penelitian dipertajam kembali agar menjadi sebuah rekomendasi kebijakan. Dengan demikian hubungan antara peneliti dan analis kebijakan terletak pada adanya kesamaan, saling mendukung dan saling menguatkan (Roy G.A. Massie, 2009).

## **KESIMPULAN**

Rekomendasi Kebijakan Kesehatan dengan didasari data yang baik akan berdampak pada efektifnya kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat. Penelitian di lapangan adalah hal yang sangat penting, tetapi memerlukan proses yang panjang. Pengambil keputusan sering kali menuntut agar penyusunan rekomendasi kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan akurat didukung data atau informasi yang sehingga rekomendasi yang di sampaikan benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Di era teknologi saat ini rekomendasi yang dikembangkan tidak harus melalui penelitian yang panjang sehingga memerlukan sumber daya yang besar. Dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui penelusuran data dan jurnal yang valid maka rekomendasi kebijakan kesehatan dapat dibuat dengan waktu yang lebih singkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Roy G.A. Massie. (2009). Kebijakan Kesehatan: Proses, Implementasi, Analisis Dan Penelitian. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 12(4), 409–417. Diambil dari

- <https://media.neliti.com/media/publications/21293-ID-kebijakan-kesehatan-proses-implementasi-analisis-dan-penelitian.pdf>
- Kemenkes RI. (2009). Undang-Undang No: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Diambil dari Kemenkes RI website: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>
- Buse, K., Mays, N., & Gill Walt. (2012). Making Health Policy. *Making Health Policy*, 288. Diambil dari [http://padk.kemkes.go.id/uploads/download/Making\\_Health\\_Policy\\_\(Compile\).pdf](http://padk.kemkes.go.id/uploads/download/Making_Health_Policy_(Compile).pdf)
- Wahono, B. B. (2015). Perancangan Tatakelola Teknologi Informasi Untuk Peningkatan Layanan Sistem Informasi Kesehatan (Studi Kasus Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara). *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, 6(1), 101–110. Diambil dari <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/simet/article/view/244>
- Mildawati, T. (2016). Teknologi Informasi Dan Perkembangannya Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 4(2), 101–110. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2000.v4.i2.1904>
- Rahmat Alyakin Dachi. (2016). *Administrasi Kebijakan Kesehatan*. Diambil dari [https://www.academia.edu/31917466/MODUL\\_ADMINISTRASI\\_KEBIJAKAN\\_KESEHATAN\\_docx](https://www.academia.edu/31917466/MODUL_ADMINISTRASI_KEBIJAKAN_KESEHATAN_docx)
- LAN-RI. (2017). Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI No. 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan. Diambil dari LAN-RI website: <https://lan.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Salinan-Peraturan-LAN-Nomor-28-Tahun-2017-tentang-Pedoman-Penulisan-KTI-bagi-Analis-Kebijakan.pdf>
- Safitri, N. (2017). Pemanfaatan Jurnal Elektronik Bidang Kesehatan Di Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Oleh Pemustaka. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 106. Diambil dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37670>
- Leni, N. E., Alexandri, M. B., Ismanto, S. U., & Widyaningsih, I. (2018). Pemanfaatan Hasil Penelitian Dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. *Responsive*, 1(2), 75–80. Diambil dari <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/20677>
- Prasanti, D., & Indriani, S. S. (2018). Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Sistem E-Health alodokter.com. *Jurnal Sositelnetologi*, 17(1), 93–103. Diambil dari [https://www.researchgate.net/publication/324913692\\_PENGEMBANGAN\\_TEKNOLOGI\\_INFORMASI\\_DAN\\_KOMUNIKASI\\_DALAM\\_SISTEM\\_E-HEALTH\\_alodoktercom](https://www.researchgate.net/publication/324913692_PENGEMBANGAN_TEKNOLOGI_INFORMASI_DAN_KOMUNIKASI_DALAM_SISTEM_E-HEALTH_alodoktercom)
- Yani, A. (2018). Pemanfaatan Teknologi Dalam Bidang Kesehatan Masyarakat. *PROMOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 97–103. Diambil dari <https://pdfs.semanticscholar.org/7380/38dde0de1bdc29786b176ab16799dd4e4166.pdf>
- Viqra Ramadanti. (2019). Kebijakan Berbasis Bukti (Based Policy Evidence) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Makassar (Studi Kasus pada BAPPEDA Kota Makassar). *Eprints-UNM*. Diambil dari <http://eprints.unm.ac.id/16536/>
- Komalasari, R. (2020). Manfaat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Masa Pandemi Covid 19. *TEMATIK - Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 7(1), 38–49. Diambil dari <https://jurnal.plb.ac.id/index.php/tematik/article/view/369>

- Rico Hermawan, Oktaviani, D., & Purnomo, R. S. (2020). Kajian Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome. In *LAN-RI*. Diambil dari <https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2021/07/6.-Laporan-RB-Outcome-Gabungan-25-Jan-2021-Dami-2.pdf>
- Raden Sanjoyo. (n.d.). Sistem informasi kesehatan. Diambil dari FMIPA - UGM website: [https://www.academia.edu/8458961/Sistem\\_Informasi\\_Kesehatan\\_dan\\_Rumah\\_Sakit\\_By\\_Raden\\_Sanjoyo](https://www.academia.edu/8458961/Sistem_Informasi_Kesehatan_dan_Rumah_Sakit_By_Raden_Sanjoyo)